

Misi Perguruan Tinggi

Oleh: Hendra Gunawan*

Setelah 68 tahun merdeka, kualitas kinerja dan capaian perguruan tinggi kita justru dipertanyakan banyak orang. Bahkan, *Transparency International* melaporkan bahwa sistem pendidikan (tinggi) di Indonesia diwarnai korupsi yang parah (Chris Parr, *Times Higher Education*, 4 Oktober 2013).

Kita bisa saja melacak di mana kesalahan bermula, yang telah menyebabkan perguruan tinggi kita karut-marut seperti saat ini. Namun, daripada mencari siapa yang salah, barangkali lebih baik menengok kembali apa yang semula dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dengan perguruan tinggi kita.

Cita-cita Pendiri Bangsa

Dalam "Sedjarah Pendidikan Indonesia" (S. Bradjanegara, 1956) dicatat bahwa pada tanggal 4-6 April 1947, ketika Pemerintah Pusat RI mengungsi ke Yogyakarta, Pengurus "Permusjawaratan Pendidikan Indonesia" mengadakan Konggres di Surakarta untuk mengumpulkan berbagai pendapat mengenai sistem pendidikan nasional, khususnya mengenai azas dan tujuan pendidikan. (Konggres tersebut dipimpin oleh Prof. Mr. Soenaria Kalapaking dan dibantu oleh Sutedja Bradjanegara sebagai notulis. Hadir pada Konggres tersebut antara lain Presiden Soekarno, Dr. Radjiman, Prof. Dr. Sardjita, Prof. Mr. Dr. Soepomo, Mr. Wongsonegoro, Drs. A. Sigit, Dr. Wedyodiningrat, dan Ki Hadjar Dewantara.)

Dalam makalahnya yang berjudul "Sekolah Perguruan Tinggi", Soepomo menyampaikan bahwa fungsi universitas (perguruan tinggi) di Indonesia akan sama dengan fungsi universitas di negara-negara moderen di Eropa dan Amerika, yaitu sebagai (a) badan pusat ilmu-ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan (b) badan untuk mendidik para calon pemimpin yang memerlukan pendidikan tinggi guna kepentingan masyarakat dan Negara.

Menurut Soepomo, universitas sebagai badan pusat ilmu-ilmu pengetahuan dan kebudayaan akan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu-ilmu itu sendiri (*beoefening der*

wetenschap zelve). Sehubungan dengan itu, Negara harus menjamin kemerdekaan untuk menyelidiki pengetahuan (baca: penelitian).

Selain itu, universitas harus (a) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para guru besar dan staf lainnya (*wetenschappelijke staf*) untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan dengan menyediakan sesempurna-sempurnanya perpustakaan, laboratoria, musea, klinik, dan lain-lain; (b) mengadakan hubungan dengan berbagai universitas lain, baik di dalam maupun di luar negeri melalui kongres antaruniversitas, pertukaran guru besar untuk sementara waktu, dan lain-lain; dan (c) mengadakan pidato-pidato untuk umum sebagai salah satu bentuk *university extension*.

Soepomo melanjutkan bahwa universitas sebagai "*opleidingsinstituut*" akan (a) memberikan pendidikan pengetahuan dasar untuk mahasiswa dari fakultas manapun, agar mereka mendapatkan "*academische levensstijl*", yakni mempunyai kecerdasan jiwa, budi, dan intelek yang diperlukan untuk jabatan-jabatan tinggi di tengah masyarakat, dan (b) memberikan persiapan untuk mengerjakan "*vak*" atau bidang keahlian tertentu (misalnya sebagai ahli hukum, dokter, insinyur, dan lain-lain).

Dalam pembagian universitas atas beberapa fakultas, Soepomo mengingatkan agar universitas memperhatikan perkembangan di negara-negara Eropa dan Amerika. Ilmu pengetahuan sosial (hukum, ekonomi, dan lain-lain), ilmu pengetahuan alam, dan humaniora (bahasa klasik, filsafat moderen, sejarah, dan lain-lain) yang lazim diajarkan di perguruan tinggi di negara-negara Barat harus diajarkan pula di perguruan tinggi Indonesia. Demikian juga ilmu pengetahuan mengenai kebudayaan timur harus mendapat perhatian khusus.

Hal-hal teknis juga diperhatikan oleh Soepomo. Menurutnya, universitas hendaknya dikepalai oleh seorang presiden tetap (*full-time*), yang tidak mengajar melainkan hanya mengurus keperluan umum universitas, seperti di Amerika. Beliau juga menyatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia hendaknya merupakan sebuah badan hukum, yakni mempunyai *rechtspersoonlijkheid*.

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Kalapaking, yang menyatakan bahwa adanya suatu universitas sebagai gabungan berbagai fakultas merupakan suatu keharusan di negara merdeka, untuk menjadi koordinator dan pendorong dalam usaha mempelajari dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Dalam makalahnya yang berjudul "Hal Universiteit", Kalapaking juga mengusulkan agar universitas negara dibentuk sebagai badan hukum dan mempunyai kemerdekaan seluas-luasnya dalam mengabdikan terhadap ilmu pengetahuan.

Kalapaking juga mengingatkan bahwa baik buruknya mutu universitas terutama tergantung pada pemilihan orang-orang yang dijadikan guru besar. Agak berbeda dengan Soepomo, Kalapaking berpendapat bahwa dalam menyusun program tiap fakultas, universitas harus memperhatikan kebutuhan nasional, jangan semata-mata meniru universitas di negara lain.

Sementara itu, Wedyodiningrat dalam makalahnya yang berjudul "Sekolah Tinggi" menyoroti kontribusi pendidikan pada kemakmuran dan perdamaian dunia. Menurutnya, universitas adalah tempat di mana setiap orang dapat mendiskusikan hal yang berguna bagi kehidupan dan mendapat pencerahan.

Apa Selanjutnya

Sebagai rangkuman catatan sejarah di atas, jelaslah bahwa ada tiga hal yang merupakan misi utama perguruan tinggi, yaitu: (1) mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, (2) menyiapkan calon-calon pemimpin masyarakat dan bangsa, serta (3) memelihara dan menumbuhkan budaya dan nilai-nilai akademik, sebagai model bagi masyarakat luas.

Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, para pelaku dan pengambil kebijakan pendidikan tinggi lebih banyak berkecukupan dengan masalah teknis, melupakan misi sejati perguruan tinggi dan mengabaikan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Maka terperangkaplah perguruan tinggi kita dengan status hukum dan pola pengelolaan keuangan yang bergonta-ganti, sistem kepegawaian yang sangat administratif (perekrutan dosen dan pengangkatan guru besar yang asal-asalan), proses akreditasi yang salah kaprah, program-program hibah yang tidak efektif, orientasi pendidikan yang tidak jelas, hingga pemilihan Rektor yang hampir selalu ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Keadaan ini tentunya tidak boleh berlanjut. Wahai para pemimpin negara, kecuali tuan-puan lupa pada amanah untuk memajukan bangsa, kembalikanlah perguruan tinggi pada khitahnya, dan fasilitasilah perguruan tinggi dalam melaksanakan misi sejatinya! Bangsa yang besar perlu ditopang perguruan tinggi bermutu!

*Guru Besar Matematika, FMIPA-ITB, Bandung